

LAPORAN BULAN JANUARI 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM telah menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) Penanganan pengaduan masyarakat secara umum bermanfaat untuk mengetahui masalah dan kekurangan di organisasi dari sudut pandang masyarakat/Pencari Keadilan. penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di BTKLPP KELAS I BATAM. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, proses hingga hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan.
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan Januari tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 6 Februari 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM

LAPORAN BULAN FEBRUARI 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penanganan pengaduan masyarakat secara umum bermanfaat untuk mengetahui masalah dan kekurangan organisasi dari sudut pandang masyarakat/Pencari Keadilan. penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di BTKLPP KELAS I BATAM. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, proses hingga hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan.
- Pada bulan Februari tim WBS telah mengikuti Webinar Strategi pembangunan zona integritas di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka meraih predikat menuju WBK/WBBM 2023

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 6 Maret 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM

LAPORAN BULAN MARET 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan Maret tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 6 April 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM

LAPORAN BULAN APRIL 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan April tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 6 Mei 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM

LAPORAN BULAN MEI 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan Mei tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 5 Juni 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM

LAPORAN BULAN JUNI 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan Juni tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 5 Juli 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM